

Dalam kamus psikologi, dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.¹²

Dalam buku *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010* yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional disebutkan bahwa¹³ perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam : (1) olah hati (*spiritual and emotional development*), (2) olah pikir (*intellectual development*), (3) olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan (4) olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*). Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan atau keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif

¹² Jamal Ma'mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), h. 27.

¹³ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010*, (Jakarta: Direktorat Ketenagaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010), h. 8-9.

menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan karakter tangguh. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan yang tercermin dalam kepedulian. Dengan demikian, terdapat enam karakter utama dari seorang individu, yakni jujur dan bertanggung jawab, cerdas, kreatif, tangguh, dan peduli.¹⁴

Sementara dalam konteks ajaran Islam, karakter adalah akhlak, yang berasal dari kata *khuluq*, yaitu tabi'at atau kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, atau sebagaimana digambarkan oleh Imam al-Gazali bahwa akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati yang baik¹⁵. Hal senada dikemukakan oleh Husni Rahim bahwa akhlak adalah perilaku sehari-hari yang dicerminkan dalam ucapan, sikap dan perbuatan. Bentuk konkret-nya misalnya, hormat dan santun kepada orangtua, guru, dan sesama manusia; suka bekerja keras, peduli dan mau membantu orang lemah atau yang mendapat kesulitan; suka belajar, tidak suka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna; menjauhi dan tidak mau melakukan kerusakan (*vandalime*), merugikan orang lain, mencuri, menipu atau berbohong; terpercaya, jujur, pemaaf dan sebagainya.¹⁶

¹⁴ Dasim Budimansyah, *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional HIMNAS PKn, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan UNJ, Jakarta, 22 November 2010, h.2.

¹⁵ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter; Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*, (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), h. 23.

¹⁶ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.39.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong atau penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.

c. Pendidikan Karakter

Setelah mengetahui tentang pengertian dari "pendidikan" dan "karakter", maka peneliti akan menguraikan tentang pengertian pendidikan karakter. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari konsep karakter dan pendidikan maka muncul yang namanya pendidikan karakter (*Character Education*). *Terminology* pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1990-an. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika bukunya yang berjudul *The Return of Character Education* kemudian disusul bukunya *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* (1991). Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan karakter. Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah pendidikan karakter mulai diperkenalkan sekitar tahun 2005-an. Hal itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan

Jika dikaitkan dengan sekolah maka, Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter pada hakekatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi bermoral yang dapat menghayati kebebasan dan tanggung jawabnya, dalam relasinya dengan orang lain dan dunianya dalam komunitas pendidikan. Dengan demikian pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada pembentukan individu bermoral, cakap mengambil keputusan yang tampil dalam perilakunya, sekaligus mampu berperan aktif dalam membangun kehidupan bersama.²⁴

Pendidikan karakter ini harus dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam pikiran, penghayatan dalam bentuk sikap dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi terhadap Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur²⁵ tersebut antara lain kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berfikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya

²⁴ Fihris, *Pendidikan Karakter di Madrasah Salafiyah*, (Semarang: PUSLIT IAIN Walisongo, 2010), h. 24-28.

²⁵ Nilai-nilai luhur di sini dapat diambil atau disarikan dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, Pancasila dan UUD 1945, dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dalam praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Oos M. Anwar, *Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan Tantangan*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Vol.16 Edisi Khusus III Oktober 2010), h. 258.

Dalam praktiknya, Lickona dkk (2007) menemukan sebelas prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif. Kesebelas prinsip tersebut sebagai berikut:

Pertama, Pendidikan karakter mempromosikan nilai etika yang baik (*akhlaqul karimah*) sebagai modal karakter dasar yang akan ditanamkan. Pendidikan karakter memegang filosofi ada banyak nilai etika dasar seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan penghargaan terhadap diri dan lain – lain yang perlu segera diajarkan untuk membentuk karakter anak yang baik.

Kedua, Karakter harus didefinisikan secara komperhensif yang mencakup penalaran, perasaan dan perilaku. Program pendidikan yang efektif mencakup aspek kognitif, emosional dan psikomotorik yang bertujuan untuk menumbuhkan pengertian, kepedulian dan tindakan yang berdasarkan nilai *akhlaqul karimah* . Oleh karena itu tugas pendidikan karakter adalah membantu para siswa agar belajar makna kebajikan, merasakan kebajikan dan bertindak berdasarkan kebajikan tersebut

Ketiga, Pendidikan karakter yang efektif memerlukan proaktif dan komperhensif yang mempromosikan nilai – nilai inti dalam semua fase pendidikan sekolah. Program pendidikan karakter di sekolah harus di desain dan direncanakan untuk mempengaruhi karakter siswa dengan langkah – langkah yang operasional, yang komperhensif yang melibatkan seluruh aspek pihak sekolah seperti kedisiplinan guru dan pegawai, kebijakan sekolah, kurikulum dan sebagainya.

Keempat, Sekolah harus menjadi komunitas yang peduli pada tumbuhnya kebajikan. Dalam mengembangkan pendidikan karakter, penciptaan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya kesadaran dari semua warga sekolah sehingga terjalin hubungan yang harmonis diantara komunitas sekolah yang disemangati oleh rasa kepedulian yang tinggi.

Kelima, untuk mengembangkan karakter siswa membutuhkan kesempatan untuk tindakan moral. Sistem belajar paling baik adalah memberikan banyak kesempatan pada peserta didik menerapkan nilai – nilai kebajikan dalam berinteraksi sehari – hari. Dengan bergulat dengan kehidupan nyata, mereka mengetahui bagaimana membagi pekerjaan dalam sebuah kelompok pembelajaran secara kooperatif, bagaimana mencapai konsensus dalam suatu pertemuan kelas, bagaimana melakukan sebuah kegiatan proyek, bagaimana mengurangi perkelahian di arena bermain, bagaimana mengembangkan pemahan praktis tentang keadilan, kerjasama, dan rasa hormat. Pemberian kesempatan yang berulang – ulang untuk melakukan tindakan moral sehingga akan membentuk kebiasaan yang menjadi karakter

Keenam, pendidikan karakter yang efektif memberikan kebermaknaan dan menantang kurikulum akademis yang menghormati semua pelajar dan membantu semuanya berhasil. Pendidikan karakter dan pembelajaran akademis tidak boleh dianggap sebagai bidang yang terpisah, melainkan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa terpisah yang saling kuat dan mendukung. Dalam suasana kelas yang terjalin

hubungan yang penuh perhatian, dimana siswa merasa senang dan dihormati oleh semua guru dan sesama teman, siswa lebih cenderung bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketujuh, Pendidikan karakter harus berusaha mengembangkan motivasi intrinsik siswa. Model pengembang karakter yang baik adalah mengembangkan komitmen intrinsik siswa untuk melakukan perilaku yang bermoral berdasarkan nilai – nilai keagamaan . Mereka harus berusaha mengurangi ketergantungan yang bersifat ekstrinsik seperti motivasi untuk mendapat imbalan dan takut mendapat hukuman. Hal ini dapat dilakukan dalam membantu siswa dalam menghadapi tantangan dan memahami materi pelajaran, keinginan untuk bekerjasama dengan siswa lain di sekolah atau komunitas mereka.

Kedelapan, semua staf harus menjadi komunitas moral, dimana semua memiliki tanggungjawab untuk pengembangan pendidikan karakter. Ada tiga yang perlu diperhatikan yaitu ; (1) semua staf sekolah harus terlibat aktif dalam mempelajari, berdiskusi dan mengambil berbagai upaya untuk pengembangan pendidikan karakter. (2) Nilai – nilai keislaman (keagamaan) yang mengatur kehidupan siswa juga kehidupan semua warga sekolah, (3) sekolah memberi waktu kepada staf untuk merefleksi masalah – masalah moral melalui rapat staf dan kelompok – kelompok pendukung yang lebih kecil.

Kesembilan, Pendidikan karakter memerlukan kepemimpinan sekolah dan siswa yang bermoral. Untuk penanaman pendidikan karakter

dibutuhkan pemimpin yang mempunyai moral yang baik dan bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Demikian juga siswa juga bisa dilibatkan dalam peran kepemimpinan di antara mereka dalam pelaksanaan program.

Kesepuluh, Sekolah harus melibatkan orangtua dan masyarakat sebagai mitra dalam upaya untuk membentuk karakter anak. Orangtua adalah yang pertama dan paling penting dalam pendidikan karakter anak – anak mereka. Oleh karena itu, pihak sekolah harus berusaha membangun komunikasi dengan orang tua untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan yang berhubungan dengan pembentukan karakter dan bagaimana orangtua dapat mendukung dalam program tersebut.

Kesebelas, Evaluasi pendidikan karakter harus menilai karakter sekolah, fungsi semua komponen sekolah sebagai pendidikan karakter, dan sejauhmana siswa memmanifestasikan karakter yang baik. Pendidikan karakter yang efektif harus melaksanakan evaluasi untuk menilai kemajuan dalam tiga hal yaitu ; (1) karakter sekolah, sampai sejauh mana sekolah menjadi komunitas yang lebih peduli dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, (2) semua komponen sekolah, sampai sejauh mana peran mereka dalam mendorong dan memotifasi serta menjadi teladan dalam pembentukan karakter, (3) karakter siswa, sampai

dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

- b. Pancasila: Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
- c. Budaya: Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat tanpa didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
- d. Tujuan Pendidikan Nasional: Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai

5. Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah Air	Berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan

Berdasarkan beberapa metode pendidikan di atas, dalam pembentukan karakter yang paling dibutuhkan adalah habituasi atau budaya pembiasaan, di mana sebuah nilai baik dapat diterapkan menjadi sebuah rutinitas sampai menjadi sebuah budaya yang sulit ditinggalkan. Selain habituasi, dalam pendidikan karakter, keteladanan menjadi sangat penting. Perilaku pendidikan akan mampu menjadi magnet bagi perilaku anak. Jadi, dalam mendidik seseorang tidak boleh begitu saja member nasehat baik kepada anak sementara dalam aktifitasnya sehari-hari tidak melakukan apa yang dia katakan. Dengan kata lain seorang pendidik harus menyalurkan perkataan dan perbuatannya sehingga anak dengan tulus dan ikhlas mengikutinya.

11. Hambatan dalam Pendidikan Karakter

Era globalisasi yang sangat pesat dan menggemparkan membawa tantangan serius bagi dunia pendidikan. Globalisasi menyebabkan liberalisme moral, pemikiran dan perilaku yang merontokkan norma dan etika yang selama ini dijunjung tinggi. Desakralisasi moral menjadi realitas yang tidak bisa di hindari. Konservatisme dan liberalisme dijadikan musuh besar oleh globalisme. Inilah yang menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa untuk mengembalikan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan dunia modern yang serba instan, liberal, dan sekuler.

Inklusi merupakan sebuah kata yang berasal dari terminology Inggris “*inclusion*” yang berarti “termasuknya atau pemasukan”. Sementara Olsen & Fuller menyatakan bahwa inklusi merupakan sebuah *terminology* yang secara umum digunakan untuk mendidik siswa, baik yang memiliki maupun tidak memiliki ketidakmampuan tertentu di dalam sebuah kelas reguler.⁸⁸

Istilah inklusi memiliki ukuran yang universal. Istilah inklusi dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusi berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusi dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu pada istilah inklusi yang disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusi didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.⁸⁹

⁸⁸ Bambang Dibyoy Wiyono, *Pendidikan Inklusif (Bunga Rampai Pemikiran Educational for All)*, (Malang: Univ. Negeri Malang, 2011), h. 4. Lihat juga Futukha, *Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the Naff Sidoarjo)*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 17.

⁸⁹ Gavin Reid, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88. Lihat juga Aryono, *Pengelolaan Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, h. 17.

2) Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989).	2) UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, 5, 32, 36 ayat (3), 45 ayat
3) Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Jomtien) (1990).	(1), 51, 52 dan 53.
4) Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993).	3) UU No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 5.
4) Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993).	4) Deklarasi Bandung (Nasional) "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" 8-14 Agustus 2004.
5) Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994).	5) Deklarasi Bukit Tinggi (Internasional) Tahun 2005.
6) Tinjauan 5 tahun Salamanca (1999).	6) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif.
7) Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia (Dakar) (2000).	7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagipeserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
8) Tujuan Pembangunan Millenium yang berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Pembangunan (2000).	

Konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang tidak diskriminatif atas dasar hambatan fisik, etnisitas, agama, bahasa, gender dan kecakapan. Pendidikan inklusi yang di deklarasikan dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan (mereka yang membutuhkan) kebutuhan khusus di Salamanca, Spanyol, 1994 bahwasanya Prinsip mendasar pendidikan inklusi yaitu mengikutsertakan anak berkelainan dikelas reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya, berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali.

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregation yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Reynolds dan Birch menyatakan bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa dan yang tidak kalah penting adalah model segregatif relatif mahal.

Kemudian pada pertengahan abad XX muncul model mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternative penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Dan model inilah yang saat ini dengan istilah pendidikan inklusi. Menurut Staub dan Peck mengemukakan bahwa

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mengeluarkan surat dinas tertanggal 20 Januari 2003, dengan Nomor 380/C.C6/MN/2003. Surat Dinas tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia agar mengupayakan berbagai model penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum.¹¹³

Pada tahun 2004 di Indonesia di selenggarakan Konvensi Nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusi sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan tuntutan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Pendidikan inklusi dianggap sebagai layanan pendidikan yang paling sesuai untuk mengembangkan potensi mereka pada saat ini.¹¹⁴

¹¹³ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*, 16.

¹¹⁴ Mamah Siti Romlah, 2010, *Pendidikan Agama Islam dalam Setting Pendidikan Inklusi*, Tesis. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- a. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat di sekitarnya.
- b. Pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya, tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus (*children with berkebutuhan khusus*) untuk memperoleh perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak.
- c. Pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama-sama anak lain seusianya dalam sekolah reguler.
- d. Pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual, walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Proses belajar lebih bersifat kebersamaan daripada persaingan.¹¹⁷
- e. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu.
- f. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- g. Anak yang hadir di sekolah berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.

¹¹⁷ Futukha, *Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusi (Studi Kasus pada Pembelajaran KPK di Kelas V SD Kreatif the Naff Sidoarjo)*, h. 27.

Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris *Individualized Education Program* (IEP) merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusi. Konsep pendidikan inklusi yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu. Maka PPI atau IEP menjadi hal yang perlu mendapat penekanan lebih.

Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan.

Lebih lanjut, tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusi. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusi mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan non-inklusi. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan secara umum memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai, (2) Pengusulan formasi pegawai, (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan

berkala, dan mutasi, (4) Mengatur usaha kesejahteraan, (5) Mengatur pembagian tugas.¹²³

Manajemen sarana-prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

Pendanaan pendidikan inklusi memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.

Pembiayaan pendidikan inklusif untuk wilayah DKI Jakarta contohnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti dan Kanwil Depag dan sumber lain yang sah. Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.¹²⁴

¹²³ Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, h. 8.

¹²⁴ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Pasal 16 dan Pasal 17. Pendanaan Penyelenggaraan pendidikan Inklusif tidak ditangani oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peran serta masyarakat, (6) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.¹²⁵

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Stakeholder pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan. Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan, maka keterlibatan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat terlibat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

¹²⁵ Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, h. 8.

Pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri peserta didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat laun harus berubah.¹²⁸

Istilah inklusi berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran.¹²⁹ Penyesuaian pendidikan (*adaptive education*) dilaksanakan dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna membantu masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan yang dikehendakinya. Penyesuaian pendidikan dapat berlangsung tatkala lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk merespon perbedaan-perbedaan peserta didik secara efektif dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.¹³⁰

¹²⁸ Henry Clay Lindgren, *Educational Psychology in the Classroom*, (Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1967), cet. ke-III, h. 503-504.

¹²⁹ Gavin Reid, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assesment, Teaching and Learning*, h. 85.

¹³⁰ George S. Morrison, *Early Childhood Education Today*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2009), h. 462.

karakter peduli lingkungan, peduli sosial dan cinta tanah air. Demikian pula Kompetensi Dasar “Mengidentifikasi kegunaan energi listrik, konversi energy listrik, transmisi energy listrik, dan berpartisipasi dalam penghematannya dalam kehidupan sehari-hari” pada mata pelajaran IPA mengandung nilai karakter rasa ingin tahu, kerja keras, kreatif dan hemat. Sedangkan Kompetensi Dasar “Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat” pada mata pelajaran Matematika mengandung nilai karakter rasa ingin tahu, teliti, mandiri dan kreatif.

Oleh karena itu segenap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik seharusnya tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tetapi juga dapat membentuk sikap atau karakternya sebagaimana nilai-nilai karakter yang melekat pada mata pelajaran tersebut.

Kedua, integrasi dalam muatan lokal. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014, muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Muatan local diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk (a) mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, dan (b) melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan

lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran muatan lokal antara lain; peduli lingkungan, peduli sosial, cinta tanah air, rasa ingin tahu, kerja keras, kreatif, serta mandiri.

Ketiga, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yang meliputi: (a) Pengkondisian, yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tersedianya tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas; (b) Kegiatan rutin, adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat, misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik dan teman; (c) Kegiatan Spontanitas, merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana; (d) Keteladanan, merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain, misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik), kebersihan,

kerapihan, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, kerja keras dan percaya diri.

Keempat, kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan merancang dan menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran aktif atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran antara lain; pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, pembelajaran discovery, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dan strategi pembelajaran lainnya yang berbasis aktivitas.

Dalam kurikulum 2013 yang sarat dengan muatan karakter, kegiatan pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan saintifik (pendekatan keilmuan). Penerapan pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar yakni; mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan, disingkat 5M (permendikbud nomor 103 tahun 2014). Pendekatan tersebut digunakan untuk menciptakan pembelajaran berbasis aktivitas, dalam hal ini peserta didik yang aktif melakukan pengamatan fakta, mengajukan pertanyaan dari apa yang diamati, mengumpulkan informasi, menalar berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kemudian mengkomunikasikan temuan/hasil pembelajarannya. Dengan demikian penerapan pendekatan saintifik dalam kegiatan

Kelima, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Menurut Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, kemandirian serta nilai-nilai karakter peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana diuraikan dalam Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik yaitu pendidikan kepramukaan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa: (a) Krida, misalnya kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya; (b) Karya ilmiah, misalnya Kegiatan

Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; (c) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya; (d) Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat; (e) Bentuk kegiatan lainnya.

Satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah (RKS). Program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.